

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Selain Bank Syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga keuangan Mikro Swasta yang berprinsip syariah. Di antaranya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan Bank Syariah untuk mengelola perekonomiannya.

BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah. Praktek lembaga keuangan syariah di Indonesia tergolong relative baru. Pada tahap pertama berdiri bank Islam. Pada tahap berikutnya bermunculan lembaga keuangan bukan bank yang mengadopsi prinsip bagi hasil yaitu BMT.

*Baitul Maal wat Tamwil* diartikan sebagai suatu badan atau instansi keuangan yang memadukan fungsi *Baituk Maal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Maal* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah<sup>1</sup>.

BMT mempunyai dua fungsi, yaitu; mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi kegiatan. Dalam menyalurkan dana kepada debitur, secara garis besar produk pembiayaan dapat dikategorikan menjadi tiga macam yakni:<sup>2</sup>

1. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk mendapatkan jasa berdasar prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan yang dikategorikan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu<sup>3</sup>.

Para pedagang kecil, salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi-2 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 96.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 61-62

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 102.

yang cukup untuk berusaha. Untuk itulah peran bank-bank Islam seperti BMT maupun koperasi yang berdasar syariat Islam mengembangkan pemikiran untuk memberikan kredit tanpa jaminan, karena BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) sebagai salah satu lembaga keuangan Islam dalam operasionalnya juga tidak menggunakan system bunga seperti yang lain dilakukan bank konvensional, BMT menerapkan system bagi hasil para nasabahnya.

Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat Indonesia adalah masalah permodalan yang lemah. Padahal modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat. Bagi dunia perekonomian dan pedagang kecil masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan.

Dengan adanya keterbatasan modal sendiri diharapkan adanya akses serta terjangkau kredit perbankan dengan jumlah yang relative terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah dan tepat waktu. Sesuai dengan sifat kebutuhannya para pedagang kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan cepat serta murah. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa menunggu, serta jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel.

Mengingat keadaan demografis di Indonesia dimana masih banyak penduduk yang tinggal dipedesaan dan menjadi pedagang kecil, keberadaan BMT terasa sangat penting. Dengan adanya BMT ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan dalam semua

jenis usaha. Begitu juga dengan para pedagang kecil yang kebanyakan tinggal didesa dan tergolong ekonomi lemah.

BMT memang beroperasi dilingkungan para pedagang kecil dan sangat membantu dalam mengatasi masalah modal mereka, ditambah lagi setelah pemerintah membuat kebijakan tentang liberalisasi perbankan dengan mengembalikan system perbankan kedalam system perhitungan ekonomi yang lebih murah. Dengan adanya fenomena tersebut, BMT yang berdasarkan syariat islam mengembangkan pemikiran untuk memberikan kredit, namun demikian, *Baitul Maal wat Tamwil* tidak bisa menembus pada lapisan paling bawah. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beropersi berdasarkan prinsip syariah termasuk BMT, merupakan fenomena actual yang menarik untuk dicermati. Paling tidak dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan system ekonomi berdasarkan syariat islam ditengah tingkat peradaban yang sudah sedemikian maju. Fenomena tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keraguan sementara pihak terhadap kebenaran ajaran islam.

Salah satu dari banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil Syariah Sejahtera Boyolali. BMT ini didirikan pada tanggal 12 Agustus 2006 oleh 27 orang pendiri berdasarkan berita acara pendirian BMT Syariah Sejahtera Boyolali. BMT ini juga telah mempunyai ijin operasional sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan akta pendirian 26 Maret 2007 N0. 5 yang dibuat dihadapan H Imawan Darori, SH, MM notaris di Boyolali. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 805/BH/XIV.5/V/2007 tertanggal 31 Mei 2007<sup>4</sup>.

Di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali juga mempunyai produk pembiayaan yang mana sebelum mendapatkan pembiayaan, nasabah dan pihak BMT melakukan transaksi pembiayaan dengan membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan, baik untuk pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *qardulhasan*.

Dengan demikian secara otomatis kedua belah pihak terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama-sama. Akan tetapi dalam prakteknya, terkadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT Syariah Sejahtera Boyolali sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, karena keadaan memaksa (*overmac*) secara sengaja ataupun tidak sengaja begitu juga dari pihak BMT kurangnya koordinasi dengan para nasabah.

Di BMT Syariah Sejahtera Boyolali ini terhitung dari tahun 2008 sampai 2013 sudah ada 524 nasabah yang telah diterima pengajuan pembiayaannya, mulai dari *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardulhasan*. Dari 524 nasabah tersebut ada 97 nasabah yang melakukan *wanprestasi*/cedera hukum<sup>5</sup>. Dengan adanya kasus-kasus pembiayaan yang bermasalah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali tersebut, maka penulis

---

<sup>4</sup> Keterangan diambil dari Laporan Rapat Anggota Tahunan KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali 2012.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Pak Taufiq Manajer Marketing KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali.

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok masalah yang dianalisa oleh penulis yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali?
2. Strategi apa saja yang digunakan oleh pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah?
3. Upaya apa saja yang telah diterapkan oleh BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam menanggulangi pembiayaan yang bermasalah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali.
- b. Untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

- c. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah supaya tidak terjadi lagi.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis adalah sebagai media pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan syariah sekaligus dapat memberikan tambahan pengalaman pada bidang tersebut.
- b. Sebagai stimulus penelitian berikutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dengan hasil yang maksimal.
- c. Secara praktis, studi ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat muslim agar lebih meyakini dan merasakan manfaat dari system perbankan syariah.

## D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini diantaranya pernah dilakukan oleh Nur Inayah (2009) di dalam skripsinya yang berjudul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*”. Beliau menyimpulkan bahwa untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT BIF menggunakan strategi yang sudah sesuai dengan

Fatwa DSN, yaitu dengan cara: *Line Facility*, potongan utang pembiayaan *murabahah* (pembiayaan dengan prinsip jual beli), *Rescheduling* pembiayaan *murabahah*, *reconditioning* pembiayaan *murabahah*, dan pencadangan bagi hasil dalam pembiayaan *musyaraah* dan *mudharabah*. Akan tetapi ada salah satu strategi yang belum diterapkan oleh BMT BIF dalam menangani pembiayaan yaitu sita jaminan.

Ilham (2009) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al-Kautsar*”. Kesimpulan yang didapat dalam skripsi tersebut adalah faktor-faktor pembiayaan bermasalah di BMT Al-Kautsar diakibatkan oleh kegagalan usaha dan persaingan yang ketat dengan pesaing yang sempurna usaha sejenis. Prosedur penanganan dengan melakukan penjadwalan kembali (jadwal angsuran, jangka waktu pembiayaan, dan jadwal pembayaran), program tabungan *shadaqah* dan pembaharuan pembiayaan. Pencegahan pembiayaan bermasalah dengan menganalisis kondisi usaha calon penerima pembiayaan, melakukan program pembinaan dan program kunjungan ke tempat penerima pembiayaan sebagai kunjungan persahabatan.

Eko Prestyo (2010) skripsi yang berjudul “*Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Ta’awun Cipulir*”. Beliau menyimpulkan bahwa tahapan-tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah yakni: 1. Pendekatan kepada nasabah, 2. Penagihan secara intensif (*collection*), 3. *Rescheduling* (perpanjangan waktu tempo kepada nasabah), 4.



*Restructuring*, 5. Potongan pelunasan, 6. Penyitaan jaminan, 7. Hapus buku (*write off*).

Ayu Tifani (2012) dalam skripsi yang berjudul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan*”. Kesimpulan yang didapat di dalam skripsi tersebut adalah strategi yang diterapkan oleh KJKS BMT Bahtera Pekalongan dalam penanganan pembiayaan bermasalah adalah strategi administrative, bantuan manajemen, *collection agent*, penyelesaian melalui jaminan, *write off*. Sedangkan pencegahannya adalah menganalisa pengajuan pembiayaan yang benar, menguasai aspek bisnis anggota, melakukan pemantauan dan pembinaan pembiayaan setelah fasilitas pembiayaan cair, memahami faktor yang sudah menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian terdahulu jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, perbedaannya terletak pada fokus objek dan lokasi penelitian. Fokus objek yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsinya adalah mengenai strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Sedangkan untuk lokasi penelitiannya di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena informasi dan data yang diperlukan didapatkan dari BMT Syariah Sejahtera Boyolali yang bersifat deskriptif atau mendeskripsikan

terhadap strategi yang dilakukan dari pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

## 2. Subyek dan Tempat Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pengelola dan nasabah KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam hal ini adalah Manajer, *customer service*, *account officer* dan nasabah pembiayaan (10 nasabah pembiayaan yang melakukan *wanprestasi*). Sedangkan untuk tempat penelitiannya adalah KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali.

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yakni data yang didapatkan secara langsung dari aktivitas penerapan strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di BMT Syariah Sejahtera Boyolali baik dari pihak BMT maupun nasabah yang bermasalah.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Wawancara

Ada dua macam metode wawancara, yaitu:

#### 1) Wawancara Terbuka

Pada metode ini peneliti akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan penelitian dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung dengan para pihak BMT Syariah Sejahtera Boyolali dalam hal ini adalah *manajer*, *customer service*, dan *account officer*.

Dari metode penelitian ini akan memperoleh keterangan terkait tata cara pengajuan pembiayaan, strategi-strategi yang diterapkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan sebagainya.

## 2) Wawancara tertutup

Wawancara tertutup ini peneliti lakukan dengan cara menyebar *questioner* kepada 10 nasabah pembiayaan yang bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali.

## b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan tentang BMT dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali.

## 5. Metode Analisa

Analisa data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data melalui metode dokumentasi dan wawancara di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, diseleksi dan disusun untuk menarik kesimpulan dari data-data tersebut.

Untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan *deskriptif evaluative*, yaitu penelitian yang menggambarkan

dan meneliti tentang keadaan dan gejala-gejala maupun aktivitas yang ada di perbankan syariah khususnya tentang strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah yang kemudian penulis menganalisis atau mengevaluasi dari sudut pandang hukum islam dan kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis, untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Sistematika dari lima bab, yaitu:

BAB I, PENDAHULUAN, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang terdiri dari penjelasan mengenai BMT, Produk-produk BMT, dan Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, bab ini memaparkan tentang KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali yang akan diteliti baik mengenai sejarah, perkembangan, struktur organisasi, produk BMT dan sebagainya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, dalam bab ini akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan

pembiayaan bermasalah, strategi-strategi untuk menyelesaikannya, dan penanggulangannya.

**BAB V    PENUTUP**, meliputi: Kesimpulan, Saran, dan Penutup.